

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Definisi dan Ukuran Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian secara luas, telah dikatakan kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya.

Kemiskinan multi dimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, (Chambers dalam Chriswardani Suryawati, 2005 pada Adit Agus Prastyo,

2010: 18) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Menurut (Chambers dalam Chriswardani Suryawati, 2005 pada Adit Agus Prastyo, 2010: 18) kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup:

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Definisi menurut UNDP (dalam Cahyat 2007: 2), kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang

atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/hari.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

## 2. Indikator Kemiskinan

Persepsi mengenai kemiskinan telah berkembang sejak lama dan sangat bervariasi antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Kriteria untuk membedakan penduduk miskin dengan yang tidak miskin mencerminkan prioritas nasional tertentu dan konsep normatif mengenai kesejahteraan. Namun pada umumnya saat negara-negara menjadi lebih kaya, persepsi mengenai tingkat konsumsi minimum yang bisa diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan akan berubah.

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), penetapan menjadi 3 yaitu:

- a. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- b. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh

52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

- c. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD \$2 per orang per hari.

Ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (*consumption based poverty line*). Oleh sebab itu, menurut (Kuncoro dalam Prima Sukmaraga, 2011) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu:

- a. Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
- b. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Garis kemiskinan dibedakan menurut tempat dan waktu, jadi setiap daerah baik di desa maupun di kota memiliki nilai yang berbeda-beda dan

biasanya nilai ini bertambah pada norma tertentu, pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan. Batas garis kemiskinan dibedakan antara desa dan kota. Perbedaan ini sangat signifikan antara di desa dan di kota, hal ini disebabkan pada perbedaan dan kompleksitas di desa dan di kota.

### **3. Penyebab Kemiskinan**

Sharp dalam Prima Sukamaraga, 2011 mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Todaro (1995) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) luasnya negara, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) relatif pentingnya sektor publik dan swasta, (5) perbedaan struktur industri.

#### **4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga kosntan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

#### **5. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Menurut Sadono Sukirno(2011), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara

keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

## 6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks pembangunan yang diprakarsai UNDP. (Hudiyanto, 2013) yang menyatakan bahwa kehidupan yang lebih baik harus diukur bukan dari ekonomi saja namun ada beberapa faktor lain sebagai berikut:

- a. Panjangnya umur manusia (*longevity*), sebagai cerminan dari kecukupan nutrisi dalam masyarakat.
- b. Pendidikan
- c. Standar hidup (GDP perkapita)

Ukuran pembangunan yang digunakan saat ini hanya memotret pembangunan ekonomi, dibutuhkan suatu indikator yang komprehensif, yang mampu menangkap tidak hanya perkembangan ekonomi tetapi juga aspek sosial dan kesejahteraan manusia, pembangunan manusia memiliki banyak dimensi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya (Mudakir, 2011).



Menurut Badan Pusat Statistik (2015), Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan; Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

- a. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- b. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- c. Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- d. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Dalam perkembangan dan kemajuan dunia dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang di ukur oleh IPM mengalami perubahan di Indonesia.

Ada beberapa perubahan perhitungan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 2011 ke 2012 sampai 2015 (BPS Indonesia, 2015):

- a. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah .
- b. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM yaitu :

Pertama

- a. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
- b. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Beberapa tahapan dalam penghitungan IPM dapat dijelaskan sebagai berikut (BPS Indonsia, 2015):

Dimensi Kesehatan

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran

$$I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$$

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan katagori sebagai berikut :

- Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
- Rendah : IPM kurang dari 50,0

## **7. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Teori pertumbuhan saat ini hanya menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

## 8. Teori Upah

Upah dan pengangguran memiliki keterkaitan yang cukup erat dimana tinggi rendahnya upah akan mempengaruhi jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja yang pada akhirnya akan berdampak pada jumlah pengangguran. Upah merupakan pembayaran jasa-jasa fisik maupun mental kepada tenagakerja. Upah uang yaitu jumlah uang yaitu diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam proses produksi. (Sukirno dalam I Made Yogatama, 2010: 24).

Sistem pengupahan mengandung tiga prinsip yaitu:

- a. Pemberian imbalan atau nilai pekerjaan
- b. Penyediaan intensif
- c. Jaminan kebutuhan buruh

Upah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penawaran dan permintaan tenaga kerja, adanya perubahan upah akan mempengaruhi besar kecilnya penawaran tenaga kerja, sesuai dengan hukum penawaran bahwa tingkat upah yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Jika tingkat upah relatif rendah maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan menjadi sedikit.

Teori Upah Alam, dari David Ricardo Teori ini menerangkan:

- a. Upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya.
- b. Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

Upah harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan (Mankiw, 2006).

Kaufman (dalam Achmad Khabhibi, 2010: 49), tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.

#### **9. Hubungan Upah Minimum Minimum Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin**

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan (Kaufman 2010)..

#### **10. Inflasi**

Pengertian inflasi secara umum dapat diartikan sebagai kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Ada beberapa jenis inflasi, dalam jurnal (*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan*

*Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999 – 2009).*

#### Pengaruh Inflasi

Akibat buruk inflasi dapat dibedakan dalam dua aspek yaitu:

- 1) Akibatnya terhadap perekonomian.
- 2) Inflasi menggalakkan spekulasi penanaman modal.
- 3) Tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi investasi.
- 4) Terjadi defisit dalam neraca perdagangan serta meningkatkan besarnya utang luar negeri.

Akibatnya kepada individu dan masyarakat.

- 1) Memperburuk distribusi pendapatan.
- 2) Pendapatan riil merosot dan nilai tabungan juga merosot.

Teori inflasi yang sering digunakan dan cukup terkenal adalah teori kuantitas. Dalam teori kuantitas dikatakan bahwa inflasi sangat dipengaruhi jumlah uang yang beredar. Dalam kenyataannya memang jumlah uang beredar itu sangat berpengaruh terhadap inflasi.

#### **11. Hubungan Inflasi dengan Jumlah Penduduk Miskin**

Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum (Phutong dalam Yanti, 2011:21). Apabila harga-harga naik secara drastis dalam periode tertentu maka tingkat kemiskinan juga akan naik. Tingkat kemiskinan naik bila tingkat upah masyarakat tetap. Jika tingkat upahnya tetap sedangkan harga barang-barang naik, masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan menjadi tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti.

Secara ringkas dalam tabel 2.1 disajikan ringkasan penelitian penelitian sejenis yang menjadi referensi dalam penelitian ini



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

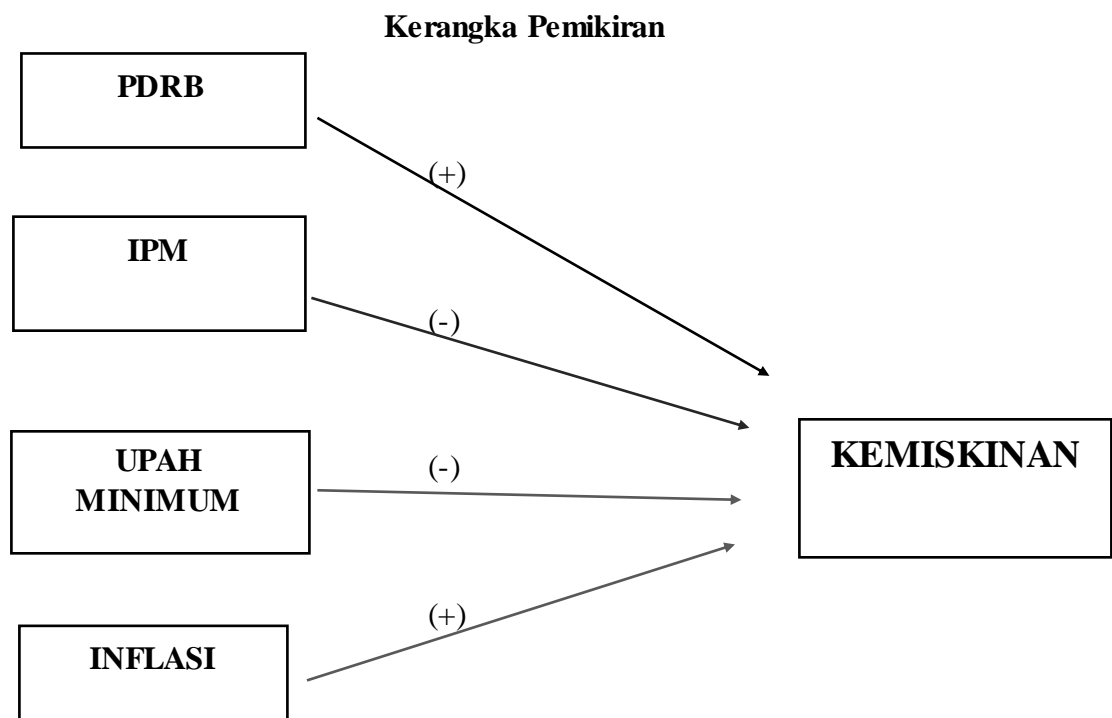
Nama Penulis	Judul	Variabel	Alat analisis	Hasil Penelitian
Whisnu Adhi Saputra dan Drs. Y Bagio Mudakir, MSP (2011).	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Penganggurn Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2005-2008.	Tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2005-2008.	Metode analisis data panel.	PDRB, IPM dan Pengangguran mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan serta jumlah penduduk mempunyai hubungan positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
Fatkhul Mufid Cholili (2014)	Analisis Pengaruh pengangguran, PDRB, dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB, jumlah Pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin	Metode analisis panel data.	PDRB berpengaruh positif tidak signifikan, IPM berpengaruh negatif dan signifikan, Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, serta PDRB, IPM dan Pengangguran secara simultan mampu memberikan penjelasan.
Primawan Wisda Nugroho, Maruto Umar Basuki (2012)	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di indonesia 2000-2011	Inflasi sebagai dipenden variabel serta Jumlah Uang beredar (JUB), Produk Domestik Bruto (PDB), Tingkat suku bunga sertifikat bank indonesia (SBI), nilai tukar (KURS) sebagai independen variabel	Model regresi linier klasik <i>OLS</i>	Variabel produk domestik bruto (PDB) dan tingkat suku bunga SBI memiliki hubungan positif signifikan terhadap inflasi, sedangkan jumlah uang beredar memiliki hubungan negatif signifikan dan Kurs memiliki hubungan positif tidak signifikan terhadap inflasi.

Nama Penulis	Judul	Variabel	Alat analisis	Hasil Penelitian
Samsubar Saleh (2002)	Faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan regional di Indonesia	<i>YPC</i> tingkat pendapatan per kapita per propinsi, <i>IMP</i> pengeluaran pemerintah investasi sumber daya manusia perkapita per propinsi, <i>IFP</i> pengeluaran pemerintah untuk investasi fisik perkapita per propinsi, <i>HN</i> angkatan harapan hidup, <i>MH</i> angka melek huruf presentase total penduduk, <i>RS</i> rata-rata lama sekolah, <i>HDI</i> indeks pembangunan manusia, <i>GEI</i> indeks partisipasi wanita dalam ekonomi dan politik, <i>RG</i> rasio gini, <i>PNH</i> rasio populasi rumah tangga fasilitas kesehatan, <i>PNW</i> rasio populasi rumah tangga tidak mendapat akses terhadap air bersih, <i>DT</i> variabel boneka.	Model estimasi dengan menggunakan data <i>cross section</i> dan model estimasi data panel	Berdasarkan hasil-hasil empirik kesimpulannya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan per propinsi di Indonesia adalah indeks pembangunan manusia( pendapatan perkapita, angka harapan hidup, rata-rata bersekolah), investasi fisik pemerintah daerah, tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat partisipasi ekonomi dan politik perempuan, populasi penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan, populasi penduduk tanpa akses terhadap air bersih dan krisis ekonomi.
Lupi Riyani (2014)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskina di propinsi Jawa Tengah tahun 1991-2011	Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, upah minimum sebagai variabel independen serta kemiskinan variabel dependen.	Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier dengan metode OLS ( <i>Ordinary Least Square</i> )	Masing-masing variabel mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

### C. Kerangka Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, dimunculkan kerangka berfikir untuk menjelaskan pengaruh PDRB, IPM, Upah Minimum Provinsi dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Lampung.

**Gambar 2.1**



### D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto diduga berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Lampung.
2. Indeks Pembangunan Manusia diduga berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Lampung.
3. Upah minimum diduga berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Lampung
4. Inflasi diduga berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Lampung.